Perdagangan Global Jadi Kunci Kemajuan UMKM

Tanggal	: Rabu , 16 Juni 2021
Media	: neraca.co.id
Halaman	: -
Wartawan	: gro
Muatan Berita	: Netral
Narasumber	: Muhammad Lutfi *(Menteri Perdagangan)*
Rubrik	: article
Topik	: UMKM

Perdagangan Global Jadi Kunci Kemajuan UMKM

Oleh: **gro** Rabu, 16/06/2021

Jakarta – Perdagangan lintas negara menggunakan sistem elektronik merupakan suatu keniscayaan. Untuk itu, Pemerintah mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melakukan berbagai terobosan dalam memanfaatkan peluang perdagangan global.

NERACA

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan "perdagangan global menggunakan sarana elektronik membawa keuntungan dan terobosan untuk menciptakan pelaku usaha baru yang tangguh. Tetapi harus ada urutan yang harus dilakukan," kata Lutfi.

Lutfi menambahkan, misalnya dalam mendorong pelaku UMKM dari sektor informal menjadi sektor formal melalui berbagai kemudahan perizinan. "Bila tanpa izin, UMKM tidak bisa masuk ke sektor formal untuk mendapatkan akses permodalan. Pemerintah telah memberikan program permodalan tanpa jaminan untuk UMKM," jelas Lutfi.

Perdagangan yang adil, lanjut Lutfi, untuk menangkap peluang dalam perdagangan global, UMKM harus kuat.

Saat ini terjadi ketimpangan yang cukup besar antara jumlah pelaku ekspor kategori pengusaha besar dengan UMKM. Artinya UMKM untuk ekspor adalah usaha yang masih memerlukan dukungan. Untuk itu, Kemendag bersama instansi terkait lainnya bertugas untuk menjaga UMKM.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menganalisis permasalahan di lokapasar, baik antarnegara (crossborder) maupun domestik.

"Pelaku usaha Indonesia terbiasa berkolaborasi dan bersaing. Di tengah iklim usaha yang kompetitif, Pemerintah sedang mempersiapkan peraturan agar perdagangan menjadi lebih adil, seimbang, dan bermanfaat," ujar Lutfi.

Lutfi menerangkan, perdagangan digital Indonesia dalam pasar global memiliki peluang yang sangat besar. Misalnya, lokapasar untuk produk pertanian. Pelaku usaha Indonesia mendapat informasi bahwa terdapat kebutuhan produk buah-buahan yang besar di Timur Tengah karena sedang memasuki musim panas.

Jika dapat memanfaatkan hal tersebut, pelaku usaha Indonesia dapat mengirimkan produknya langsung ke pasar tersebut.

"Jadi, lokapasar harus digalakkan dan menjadi peluang. Yang tidak boleh adalah perdagangan yang tidak adil dan melanggar asas-asas perdagangan," kata Lutfi.

Lutfi pun menjelaskan, dengan adanya perdagangan melalui sistem elektronik, perdagangan UMKM menjadi lebih mudah dan dekat. Apalagi dengan didukung infrastruktur yang dibangun pemerintah, logistik menjadi lebih murah.

"Ketika infrastruktur dan digital ekonomi digabungkan, maka biaya logistik akan menjadi lebih murah dari negara lain. Ini semua bisa dikerjakan karena adanya sistem digital. Kita diuntungkan oleh proses digitalisasi ekonomi," jelas Lutfi.

Lebih lanjut, harus diakui bahwa saat ini tengah terjadi terjadi shifting pola konsumsi barang dan jasa dari luring (offline) ke daring (online); trafik meningkat sekitar 15%-20%.

Dari sisi pelaku usaha, sebanyak 37% konsumen baru memanfaatkan ekonomi digital pascapandemi. Selain itu, 45% pelaku usaha juga aktif melakukan penjualan melalui e-commerce selama pandemi.

"UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) digital merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen mendorong digitalisasi UMKM tradisional/luring dan memberikan kemudahan bagi UMKM yang sudah terdigitalisasi," ungkap Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto.

Memang, Airlangga mengakui, secara umum, produk domestik bruto (PDB) ekonomi digital pada 2020 mencapai US$44 miliar atau tumbuh 11% dari 2019. Bahkan Mckinsey Global Institute (MGI) memprediksi bahwa ekonomi digital akan mampu menyumbang sebesar US$130-US$150 miliar bagi pertumbuhan PDB Indonesia di 2025. Selanjutnya, dalam jangka panjang, besaran kontribusinya akan dapat mencapai 3,0%.

Dalam rangka pengembangan ekonomi digital, pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Ekonomi Digital. Strategi ini akan memanfaatkan 4 pilar fondasi untuk mewujudkan ekonomi digital terdepan yang mendorong inklusivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Pemerintah memberi dukungan dalam pembangunan infrastruktur digital supaya tercipta iklim inovasi yang baik. UU Cipta Kerja akan mengakomodasi upaya pengembangan ekonomi digital, antara lain melalui pengaturan tentang perluasan pembangunan infrastruktur broadband; tarif batas atas dan/atau bawah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat; serta kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru," papar Airlangga.

Di sisi lain, Airlangga menhjelaskan, pemerintah senantiasa mendorong para pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital salah satu diantaranya melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Seperti diketahui, alokasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021 sebesar Rp699,43 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan realiasi PEN di tahun lalu yang sebesar Rp579,78 triliun. Khusus untuk dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), telah dialokasikan anggaran PEN sebesar Rp184,83 triliun.

Anggaran untuk dukungan UMKM dan pembiayaan Korporasi diberikan melalui enam stimulus, yaitu: Subsidi Bunga UMKM, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Penempatan Dana pada Bank Umum, Insentif Pajak, dan Restrukturisasi Kredit.